

**RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2018**



**Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telpon (0517) 21242 Faxes. (0517) 21242**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

Renja SKPD Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.

Penyusunan Renja Perubahan SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan secara bertahap dapat mencapai Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif** “.

Semoga Renja Perubahan SKPD ini dapat memberikan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Kandangan, Juni 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690919 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	7
2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	13
3.3. Program dan Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah menyusun Rancangan Rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 yang tertuang pada Perda Nomor 11 Tahun 2013 mempunyai visi **“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif “**.

Dengan Pemahaman terhadap visi diatas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita-citakan, yaitu **“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera”** yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.

“Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Agamis” yang ditandai dengan suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Tak dapat dielakan sebagai dampak dari pembangunan disegala bidang, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang sangat cepat dimasyarakat dalam era globalisasi selain menimbulkan efek positif juga dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya terjadinya pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai – nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif ” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kesempatan ini menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Asas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
- 8) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stackholders*) tentang rencana pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Keuangan Daerah serta Kesekretariatan;
- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan Hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, menjelaskan secara rinci, Evaluasi pelaksana Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Tahun lalu dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dan Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara rinci, Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Program dan Kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Renja SKPD Tahun 2016 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2016. Program Utama SKPD adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.236.226.950,- telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi sebesar Rp. 2.585.328.489,- , secara rinci kegiatan – kegiatan program dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR	PAGU	REALISASI*	%
1. Penyusunan Standar Satuan Harga	82.900.000	48.373.400	58,35
2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	98.080.000	22.290.000	22,73
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	301.900.000	175.389.320	58,10
4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	27.790.000	950.000	3,42
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	352.700.000	194.874.600	55,25
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	30.400.000	12.184.080	40,08
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaks APBD	43.848.250	34.079.500	77,72
8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	38.087.000	19.025.000	49,95
9. Penyusunan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	201.355.000	96.546.000	47,95
10. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	423.815.500	382.638.100	90,28
11. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	109.373.750	61.877.230	56,57
12. Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan Daerah	208.223.750	188.186.750	90,38
13. Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial	59.200.000	16.660.000	28,14
14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	216.110.000	161.710.109	74,83
15. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	471.849.000	328.547.500	69,63
16. Penyediaan dok. PBB P2 dan BPHTB	87.221.000	81.725.000	93,70
17. Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis	113.533.700	104.599.550	92,13
18. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	459.270.000	387.705.150	84,42
19. Inventarisasi Barang/ Aset Daerah	22.595.000	3.973.750	17,59
20. Pengamanan Barang/Aset Daerah	613.130.000	46.386.225	7,57
21. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan BMD	177.155.000	150.579.825	85,00
22. Sensus Barang Milik Daerah	28.220.000	12.570.000	44,54

INDIKATOR	PAGU	REALISASI*	%
23. Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA dan BMD	27.945.000	20.861.500	74,65
24. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	41.525.000	33.595.900	80,91

2.1.1. Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bakeuda Triwulan II Kab. HSS Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja	
			1	4	5	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.427.666.000	Rp.	55.360.991.721	Rp.
		2. Persentasi SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan	83	%	50	%
		3. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	<09 Oktober 2017	Waktu		Waktu
		4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	≤ 31 Maret 2017	Waktu	31 Maret 2017	Waktu
		5. Persentasi Realisasi belanja langsung	94	%	30,77%	%
		6. Persentasi SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang	100	%	100	%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	51	%	50,86	%
		2. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100	%	106,38	%
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Survey Kepuasan Masyarakat	85	Indeks		Indeks
		2. Persentasi Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%		%
		3. Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak	100	%	100	%
		4. Predikat Penilaian AKIP	B	Predikat	B	Predikat

1.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kebijakan pembangunan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan urusan pemerintahan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Badan Keuangan Daerah mempunyai 5 (lima) Program yakni ; 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program operasional yang diimplementasikan dalam 45 (empat puluh lima) kegiatan. Kinerja yang sesuai SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tidak ada pada Badan Keuangan daerah sedangkan Pelayanan yang ada di Badan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1) Pelayanan Penerbitan SP2D

Pelayanan Penerbitan SP2D bagi Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga/Masyarakat saat ini sudah berjalan baik dengan didukung oleh Aplikasi SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.

2) Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB

Pelayanan dalam pencetakan dan pembuatan PBB-P2 dan BPHTB serta pembayaran PBB-P2 dan BPHTB yang akan disetorkan ke Kas Daerah melalui aplikasi SIM PBB.

3) Penyaluran Bansos dan Hibah

Penyaluran Hibah dan bansos saat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyaluran Hibah dan Bansos.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, anggaran, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan teknis dan pembinaan dibidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pendapatan; perencanaan dan anggaran, bidang akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta bidang aset daerah.
- c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai : (1). SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan (2). SKPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas: (1). menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; (2). menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; (3). melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(4). melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah); (5). menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan (6). melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut : (1). menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; (2). Mengesahkan DPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; (4). memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; (5). melaksanakan pemungutan pajak daerah; (6). menetapkan SPD; (7). menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; (8). melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; (9). menyajikan informasi keuangan daerah; dan (10). melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Sedangkan selaku kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas: (1). menyusun RKA-SKPD; (2). menyusun DPA-SKPD; (3). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; (4). melaksanakan anggaran

SKPD yang dipimpinnya; (5). melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; (6). melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; (7). mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; (8). menandatangani SPM; (9). mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; (10). mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; (11). menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; (12). mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; (13). Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan (14). bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut diatas ada beberapa isu penting (Isu Strategis) yaitu :

- 1) Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
- 2) Belum Optimalnya Penerapan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Belum Optimalnya Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan penata-usahaan perbendaharaan
- 5) Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.
- 6) Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Masih Belum Optimal.

2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Renja SKPD Tahun 2017 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Badan Keuangan Daerah.

Semua Program dan kegiatan yang sesuai RENSTRA Badan Keuangan Daerah Pengukuran Pencapaian Sasarannya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	6	7	8	9	10	1	6	7	8	9	10
1.	Program Administrasi Perkantoran		1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85		1.	Program Administrasi Perkantoran		1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85	
			2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%					2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	6.400 Lembar	37.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	6.400 Lembar	37.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet	6 rekening	110.400.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet	6 rekening	110.400.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah STNK Kend.Dinas/Operasional	31 Unit	12.750.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah STNK Kend.Dinas/Operasional	31 Unit	12.750.000
	Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD	SKPD	Jumlah Pameran dan pawai pembangunan	2 Kegiatan	13.600.000		Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD	SKPD	Jumlah Pameran dan pawai pembangunan	2 Kegiatan	13.600.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Laptop; Komputer; Printer; Server	30 Unit, 22 Unit, 33 Unit & 2 Unit	62.000.000		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Laptop; Komputer; Printer; Server	30 Unit, 22 Unit, 33 Unit & 2 Unit	62.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	4.761 Rim, Ktk,Pak.	169.965.500		Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	4.761 Rim, Ktk,Pak.	169.965.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Ampolp, map, Blangko SPM, SP2D, Digital Printing, Kartu Fisis.	3.166 Pak, Buah, Meter dan Lembar	99.712.250		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Ampolp, map, Blangko SPM, SP2D, Digital Printing, Kartu Fisis.	3.166 Pak, Buah, Meter dan Lembar	99.712.250
	Penyediaan Komponen Instalasi	SKPD	Lampu, Kabel, Baterai dan Stop	300 Set, Buah, Meter	9.566.000		Penyediaan Komponen Instalasi	SKPD	Lampu, Kabel, Baterai dan Stop	300 Set, Buah, Meter	9.566.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	AC; Meubelair Kantor; Laptop; Printer	4 Unit; 15 Buah; 4 Unit; 9 Unit	191.919.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	AC; Meubelair Kantor; Laptop; Printer	4 Unit; 15 Buah; 4 Unit; 9 Unit	191.919.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Surat kabar harian yang tersedia	2 Media Massa	7.200.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Surat kabar harian yang tersedia	2 Media Massa	7.200.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah	605 Orang/Kali	26.200.000		Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah	605 Orang/Kali	26.200.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	495.000.000		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	495.000.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	SKPD	Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah	179 OB dan OK	160.425.000		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	SKPD	Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah	179 OB dan OK	160.425.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dalam daerah	1 Tahun	52.000.000,00		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dalam daerah	1 Tahun	52.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85	
			2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%					2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%	
	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Rehab/Pembangunan gedung kantor	2 Buah	4.065.900.000		Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Rehab/Pembangunan gedung kanto	2 Buah	4.065.900.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jlh Kendaraan DInas/Operasional Terpeliharaan Secara Rutin	2 Unit	103.600.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jlh Kendaraan DInas/Operasional Terpeliharaan Secara Rutin	2 Unit	103.600.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85	
			2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%					2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%	
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Bimtek Implementasi per Undang-Undangan	1 Kegiatan	30.275.000		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Bimtek Implementasi per Undang-Undangan	1 Kegiatan	30.275.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai AKIP	B			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai AKIP	B	
			Persentase Temuan BPK/ masy. yang ditindak lanjuti	100%					Persentase Temuan BPK/ masy. yang ditindak lanjuti	100%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	1 Cakupan Laporan SAKIP, LPPD,Renja	1 Dok	26.455.000		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	1 Cakupan Laporan SAKIP, LPPD,Renja	1 Dok	26.455.000
			2 Cakupan Laporan RFK	12 Dok					2 Cakupan Laporan RFK	12 Dok	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	6	7	8	9	10	1	6	7	8	9	10
2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Penerimaan PAD Dari Sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2 Cakupan SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai Target Penerimaan	118.876.272.000 83 %		2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Penerimaan PAD Dari Sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2 Cakupan SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai Target Penerimaan	118.876.272.000 83 %	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	1. Jumlah Proyeksi PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2. Jumlah SKPD Pengelola PAD	118.876.272.000 24	370.715.000		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	1. Jumlah Proyeksi PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2. Jumlah SKPD Pengelola PAD	118.876.272.000 24	370.715.000
	Penyediaan Cetak SPTPD dan Karcis	SKPD	1. Jumlah Penerimaan PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2. Jumlah SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai target	118.876.272.000 20	113.604.800		Penyediaan Cetak SPTPD dan Karcis	SKPD	1. Jumlah Penerimaan PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2. Jumlah SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai target	118.876.272.000 20	113.604.800
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Penerimaan Dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB	1.551.394.000			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Penerimaan Dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB	1.551.394.000	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pelunasan PBB	SKPD	Jumlah Penilaian dan Penerimaan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB	1.551.394.000	591.785.000		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pelunasan PBB	SKPD	Jumlah Penilaian dan Penerimaan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB	1.551.394.000	591.785.000
	Penyediaan Dokumen PBB-P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah Nilai SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan	1.551.394.000	95.321.000		Penyediaan Dokumen PBB-P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah Nilai SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan	1.551.394.000	95.321.000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan RKA dan RKAP sesuai dengan ketentuan 2 Cakupan Pedoman Penyusunan RKA SKPD 3 Cakupan Rancangan APBD Tepat Waktu	74 Dok 1 Dok 09 Oktober 2017			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan RKA dan RKAP sesuai dengan ketentuan 2 Cakupan Pedoman Penyusunan RKA SKPD 3 Cakupan Rancangan APBD Tepat Waktu	74 Dok 1 Dok 09 Oktober 2017	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	SKPD	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	73 dokumen	78.950.000		Penyusunan Standar Satuan Harga	SKPD	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	73 dokumen	78.950.000
	Penyusunan APBD	SKPD	Raperda APBD	1 Perda	346.700.000		Penyusunan APBD	SKPD	Raperda APBD	1 Perda	346.700.000
	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran APBD	1 Perbub	34.400.000		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran APBD	1 Perbub	34.400.000
	Penyusunan Perubahan APBD	SKPD	Raperda APBDP	1 Perda	608.275.000		Penyusunan Perubahan APBD	SKPD	Raperda APBDP	1 Perda	608.275.000
	Penyusunan Pelaksanaan Perubahan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran PAPBD	1 Perbub	46.050.000		Penyusunan Pelaksanaan Perubahan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran PAPBD	1 Perbub	46.050.000
	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	SKPD	Meleksanakan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	73 SKPD	111.250.000		Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	SKPD	Meleksanakan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	73 SKPD	111.250.000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan SP2D Sesuai Dengan Ketentuan 2 Cakupan Bendahara SKPD Yang Melaksanakan 3 Cakupan Penyaluran Hibah dan Bansos	100% 100% 100%			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan SP2D Sesuai Dengan Ketentuan 2 Cakupan Bendahara SKPD Yang Melaksanakan 3 Cakupan Penyaluran Hibah dan Bansos	100% 100% 100%	
	1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	SKPD	1. Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan 2. Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan	100% 4 Kali	453.100.000		1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	SKPD	1. Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan 2. Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang	100% 4 Kali	453.100.000
	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan	100%	55.800.000,00		2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan	100%	55.800.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	6	7	8	9	10	1	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100%			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100%	
			2. Cakupan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100%					2. Cakupan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100%	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	SKPD	Jumlah Sisdur Pegelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	84.655.000		Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	SKPD	Jumlah Sisdur Pegelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	84.655.000
	Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD	SKPD	Cakupan Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	88.490.780		Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD	SKPD	Cakupan Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	88.490.780
	Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Cakupan Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbub	51.079.600		Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Cakupan Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbub	51.079.600
	Penyusunan Lap Semester I dan Prognosis	SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis 6 berikutnya	73 Laporan	47.325.250		Penyusunan Lap Semester I dan Prognosis	SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis 6 berikutnya	73 Laporan	47.325.250
	Penyusunan Lap.Keu Pemda	SKPD	Cakupan Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	506.615.000		Penyusunan Lap.Keu Pemda	SKPD	Cakupan Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	506.615.000
	Penyusunan Lap. Triwulan Keuanga Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Triwulanan	73 Laporan	61.287.500		Penyusunan Lap. Triwulan Keuanga Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Triwulanan	73 Laporan	61.287.500
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	51%		3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	51%	
			2. Cakupan Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD	100%					2. Cakupan Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD	100%	
			3. Cakupan SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Milik	100%					3. Cakupan SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Milik	100%	
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	SKPD	Cakupan BMD yang dihapuskan, dimusnahkan oleh SKPD	100%	254.500.000		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	SKPD	Cakupan BMD yang dihapuskan, dimusnahkan oleh SKPD	100%	254.500.000
	Inventarisasi Aset/Barang Daerah	SKPD	CakupanTanah Pemda Yang bersertifikat	51%	266.546.000		Inventarisasi Aset/Barang Daerah	SKPD	CakupanTanah Pemda Yang bersertifikat	51%	266.546.000
	Pengamanan Barang/Aset daerah	SKPD	CakupanTanah Pemda Yang bersertifikat	51%	826.525.000		Pengamanan Barang/Aset daerah	SKPD	CakupanTanah Pemda Yang bersertifikat	51%	826.525.000
	Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA BMD	SKPD	Jumlah Simda yang terpelihara	2	43.900.000		Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA BMD	SKPD	Jumlah Simda yang terpelihara	2	43.900.000
	Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD	SKPD	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD	44	55.425.000		Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD	SKPD	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD	44	55.425.000
	Fasilitasi Majelis TP-TGR	SKPD	Cakupan BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan oleh SKPD	100%	107.950.000		Fasilitasi Majelis TP-TGR	SKPD	Cakupan BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan oleh SKPD	100%	107.950.000
	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas	SKPD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 Buah	1.829.970.000		Pengadaan Aset Kendaraan Dinas	SKPD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 Buah	1.829.970.000
	Pengelolaan Aset Kendararaan dinas/ Operasional	SKPD	Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Buah	16.800.000		Pengelolaan Aset Kendararaan dinas/ Operasional	SKPD	Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Buah	16.800.000
	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	4 Buah	480.400.000		Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	4 Buah	480.400.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

3.2.2 Sasaran

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara rinci program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Daftar Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kab.HSS
Tahun 2018**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	2018		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	6	7	8	9	10	11
I.	Program Administrasi Perkantoran		1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85		
			2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	6.400 Lembar	37.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet	6 rekening	110.400.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah STNK Kend.Dinas/Operasional	31 Unit	12.750.000	APBD
4	Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD	SKPD	Jumlah Pameran dan pawai pembangunan	2 Kegiatan	13.600.000	APBD
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Laptop; Komputer; Printer; Server	30 Unit, 22 Unit, 33 Unit & 2 Unit	62.000.000	APBD
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	4.761 Rim, Ktk,Pak.	169.965.500	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Ampolp, map, Blangko SPM, SP2D, Digital Printing, Kartu Fisis.	3.166 Pak, Buah, Meter dan Lembar	99.712.250	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi	SKPD	Lampu, Kabel, Baterai dan Stop	300 Set, Buah, Meter	9.566.000	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	AC; Meubelair Kantor; Laptop; Printer	4 Unit; 15 Buah; 4 Unit; 9 Unit	191.919.000	APBD
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Surat kabar harian yang tersedia	2 Media Massa	7.200.000	APBD
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah	605 Orang/Kali	26.200.000	APBD
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	495.000.000	APBD
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	SKPD	Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah	179 OB dan OK	160.425.000	APBD
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dalam daerah	1 Tahun	52.000.000,00	APBD
II.	Program Peningkatan Sarana		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85		
			2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%		
1	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Rehab/Pembangunan gedung kantor	2 Buah	4.065.900.000	APBD
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jlh Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharaan Secara Rutin	2 Unit	103.600.000	APBD
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85		
			2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%		
1	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Bimtek Implementasi per Undang-Undangan	1 Kegiatan	30.275.000	APBD
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Nilai AKIP	B		
			Persentase Temuan BPK/ masy. yang ditindak lanjuti	100%		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	1 Cakupan Laporan SAKIP, LPPD,Renja	1 Dok	26.455.000	APBD
			2 Cakupan Laporan RFK	12 Dok		

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	2018		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	6	7	8	9	10	11
	VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Penerimaan PAD Dari Sektor selain PBB-P2 dan BPHTB	118.876.272.000		
			2 Cakupan SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai Target Penerimaan	83 %		
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	1. Jumlah Proyeksi PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB	118.876.272.000	370.715.000	APBD
2			2. Jumlah SKPD Pengelola PAD	24		
3	Penyediaan Cetak SPTPD dan Karcis	SKPD	1. Jumlah Penerimaan PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB	118.876.272.000	113.604.800	APBD
			2. Jumlah SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai target	20		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Penerimaan Dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB	1.551.394.000		
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pelunasan PBB	SKPD	Jumlah Penilaian dan Penerimaan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB	1.551.394.000	591.785.000	APBD
5	Penyediaan Dokumen PBB-P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah Nilai SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan	1.551.394.000	95.321.000	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan RKA dan RKAP sesuai dengan ketentuan	74 Dok		
			2 Cakupan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	1 Dok		
			3 Cakupan Rancangan APBD Tepat Waktu	09 Oktober 2017		
6	Penyusunan Standar Satuan Harga	SKPD	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	73 dokumen	78.950.000	APBD
7	Penyusunan APBD	SKPD	Raperda APBD	1 Perda	346.700.000	APBD
8	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran APBD	1 Perbub	34.400.000	APBD
9	Penyusunan Perubahan APBD	SKPD	Raperda APBDP	1 Perda	608.275.000	
10	Penyusunan Pelaksanaan Perubahan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran PAPBD	1 Perbub	46.050.000	APBD
11	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	SKPD	Meleaksanakan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	73 SKPD	111.250.000	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan SP2D Sesuai Dengan Ketentuan	100%		
			2. Cakupan Bendahara SKPD Yang Melaksanakan	100%		
			3. Cakupan Penyaluran Hibah dan Bansos	100%		
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	SKPD	1. Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	100%	453.100.000	APBD
			2. Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan	4 Kali		
13	Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan	100%	55.800.000,00	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100%		
			2. Cakupan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100%		
14	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	SKPD	Jumlah Sisduf Pegnelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	84.655.000	APBD
15	Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD	SKPD	Cakupan Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	88.490.780	APBD
16	Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Cakupan Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbub	51.079.600	APBD
17	Penyusunan Lap Semester I dan Prognosis	SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis 6 berikutnya	73 Laporan	47.325.250	APBD
18	Penyusunan Lap.Keu Pemda	SKPD	Cakupan Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	506.615.000	APBD
19	Penyusunan Lap. Triwulan Keuanga Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Triwulanan	73 Laporan	61.287.500	APBD

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	2018		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	51%		
			2. Cakupan Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pindahtanganan BMD	100%		
			3. Cakupan SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Milik	100%		
20	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	SKPD	Cakupan BMD yang dihapuskan, dimusnahkan oleh SKPD	100%	254.500.000	APBD
21	Inventarisasi Aset/Barang Daerah	SKPD	Cakupan Tanah Pemda Yang bersertifikat	51%	266.546.000	APBD
22	Pengamanan Barang/Aset daerah	SKPD	Cakupan Tanah Pemda Yang bersertifikat	51%	826.525.000	APBD
23	Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA BMD	SKPD	Jumlah Simda yang terpelihara	2	43.900.000	APBD
24	Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD	SKPD	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD	44	55.425.000	APBD
25	Fasilitasi Majelis TP-TGR	SKPD	Cakupan BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan oleh SKPD	100%	107.950.000	APBD
26	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas	SKPD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 Buah	1.829.970.000	APBD
27	Pengelolaan Aset Kendararaan dinas/ Operasional	SKPD	Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Buah	16.800.000	APBD
28	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	4 Buah	480.400.000	APBD

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018. Renja SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap menerapkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Badan Keuangan Daerah akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Renja SKPD TA.2018, dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja TA.2018 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

**EVALUASI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Survey Kepuasan Masyarakat	4.04.05.1	Program Administrasi Perkantoran		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85				85		
						2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%				100%		
		2. Persentasi temuan pemeriksaan BPK yang selesai ditindak lanjuti	4.04.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	6.400 Lembar	37,000,000	APBD			85	37,000,000
		3. Persentasi pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti	4.04.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet	6 rekening	110,400,000	APBD			85	110,000,000
			4.04.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jumlah STNK Kend.Dinas/Operasional	31 Unit	12,750,000	APBD			2	15,750,000
			4.04.05.01.07	Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD	SKPD	Jumlah Pameran dan pawai pembangunan	2 Kegiatan	13,600,000	APBD			85	11,444,000
		4. Hasil evaluasi AKIP	4.04.05.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Laptop; Komputer; Printer; Server	30 Unit, 22 Unit, 33 Unit & 2 Unit	62,000,000	APBD			100%	62,000,000
			4.04.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	4.761 Rim, Ktk,Pak.	169,965,500	APBD			85	169,965,500
			4.04.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Ampolp, map, Blangko SPM, SP2D, Digital Printing, Kartu Fisik.	3.166 Pak, Buah, Meter dan Lembar	99,712,250	APBD			85	110,000,000
			4.04.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi	SKPD	Lampu, Kabel, Baterai dan Stop Kontak	300 Set, Buah, Meter	9,566,000	APBD			85	9,566,000
			4.04.05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	AC; Meubelair Kantor; Laptop; Printer	4 Unit; 15 Buah; 4 Unit; 9 Unit	191,919,000	APBD			100%	250,000,000
			4.04.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Surat kabar harian yang tersedia	2 Media Massa	7,200,000	APBD			85	15,293,800
			4.04.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah	605 Orang/Kali	26,200,000	APBD			85	20,000,000
			4.04.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	495,000,000	APBD			85	495,000,000
			4.04.05.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	SKPD	Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah	179 OB dan OK	160,425,000	APBD			85	1,126,525,000
			4.04.05.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dalam daerah	1 Tahun	52,000,000.00	APBD			85	52,000,000
			4.04.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan			1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85				85	
							2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%				100%	
			4.04.05.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Rehab/Pembangunan gedung kantor	2 Buah	4,065,900,000	APBD			85	3,225,000,000
			4.04.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Jlh Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharaan Secara Rutin	2 Unit	103,600,000	APBD			85	120,000,000
			4.04.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85				85	
							2. Persentasi Keluhan Masy. yang ditindak lanjuti	100%				100%	
			4.04.05.05.03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Bimtek Implementasi per Undang-Undangan	1 Kegiatan	30,275,000	APBD			85	30,275,000
			4.04.05.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Nilai AKIP	B				BB	
					Persentase Temuan BPK/ masy. yang ditindak lanjuti	100%				100%			
	4.04.05.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	SKPD	1 Cakupan Laporan SAKIP, LPPD, Renja	1 Dok	26,455,000	APBD			1 Dok	26,150,200		
					2 Cakupan Laporan RFK	12 Dok				12 Dok			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah	1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2 Persentasi SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target	4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Penerimaan PAD Dari Sektor selain PBB-P2 dan BPHTB	118,876,272,000				124,820,085,600	419,469,800		
						2 Cakupan SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai Target Penerimaan	83 %				91 %			
			4.04.05.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	1. Jumlah Proyeksi PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2. Jumlah SKPD Pengelola PAD	118,876,272,000 24	370,715,000	APBD			124,820,085,600 24	305,865,000	
			4.04.05.17.29	Penyediaan Cetak SPTPD dan Karcis	SKPD	1. Jumlah Penerimaan PAD sektor selain PBB-P2 dan BPHTB 2. Jumlah SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai target	118,876,272,000 20	113,604,800	APBD			124,820,085,600 22	113,604,800.00	
			4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Penerimaan Dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB	1,551,394,000					1,551,394,000	687,051,000	
			4.04.05.17.22	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pelunasan PBB	SKPD	Jumlah Penilaian dan Penerimaan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB	1,551,394,000	591,785,000	APBD			1,551,394,000	591,785,000	
			4.04.05.17.28.00	Penyediaan Dokumen PBB-P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah Nilai SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan	1,551,394,000	95,321,000	APBD			1,551,394,000	95,266,000.00	
			3. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan RKA dan RKAP sesuai dengan ketentuan	74 Dok					74 Dok	
							2 Cakupan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	1 Dok					1 Dok	
							3 Cakupan Rancangan APBD Tepat Waktu	09 Oktober 2017					09 Oktober 2018	
		4.04.05.17.02		Penyusunan Standar Satuan Harga	SKPD	Jumlah Buku Standar Satuan Harga	73 dokumen	78,950,000	APBD			73 dokumen	71,950,000	
		4.04.05.17.06		Penyusunan APBD	SKPD	Raperda APBD	1 Perda	346,700,000	APBD			1 Perda	344,700,000	
		4.04.05.17.07		Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran APBD	1 Perbub	34,400,000	APBD			73 SKPD	33,400,000	
		4.04.05.17.08		Penyusunan Perubahan APBD	SKPD	Raperda APBDP	1 Perda	608,275,000				1 Perda	605,775,000	
		4.04.05.17.09		Penyusunan Pelaksanaan Perubahan APBD	SKPD	Raperbub tentang Penjabaran PAPBD	1 Perbub	46,050,000	APBD			73 SKPD	44,750,000	
		4.04.05.17.41	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	SKPD	Meleaksanakan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	73 SKPD	111,250,000	APBD			73 SKPD	108,820,000		
			4. Persentasi SP2D dgn sumber dana & kode rekening yg tepat 5. Persentasi Penyerapan belanja langsung SKPD	4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Cakupan SP2D Sesuai Dengan Ketentuan	100%				100%		
							2. Cakupan Bendahara SKPD Yang Melaksanakan Rekonsiliasi	100%				100%		
							3. Cakupan Penyaluran Hibah dan Bansos	100%				100%		
				4.04.05.17.23	1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	SKPD	1. Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan 2. Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan	100% 4 Kali	453,100,000	APBD			100% 4 Kali	1,181,675,000
4.04.05.17.28	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos			SKPD	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan	100%	55,800,000.00	APBD			100%	70,000,000.00		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTARA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018			
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6. Ketepatan Waktu Penyampaian Lap. Keu. Daerah	4.04.05.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100%					100%		
						2. Cakupan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100%				100%			
			4.04.05.17.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Jumlah Sisduk Pegelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	84,655,000	APBD					
			4.04.05.17.10	Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD	SKPD	Cakupan Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	88,490,780	APBD			1 Perda	50,000,000	
			4.04.05.17.11	Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Cakupan Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbub	51,079,600	APBD			1 Perbub	561,080,000	
			4.04.05.17.26	Penyusunan Lap Semester I dan Prognosis	SKPD	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis 6 berikutnya	73 Laporan	47,325,250	APBD			73 Laporan	46,870,000	
			4.04.05.17.31	Penyusunan Lap. Keu Pemda	SKPD	Cakupan Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	506,615,000	APBD			1 Dokumen	550,000,000	
			4.04.05.17.33	Penyusunan Lap. Triwulan Keuanga Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Triwulanan	73 Laporan	61,287,500	APBD			73 Laporan	10,000,000	
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	1. Persentase jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Cakupan Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	51%					52%		
						2. Cakupan Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pindahtanganan BMD	100%				100%			
						3. Cakupan SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%				100%			
		2. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemkab. HSS	4.04.05.17.16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	SKPD	Cakupan BMD yang dihapuskan, dimusnahkan oleh SKPD	100%	254,500,000	APBD			100%	210,500,000	
			4.04.05.17.21	Inventarisasi Aset/ Barang Daerah	SKPD	CakupanTanah Pemda Yang bersertifikat	51%	266,546,000	APBD			51%	210,360,000	
			4.04.05.17.25	Pengamanan Barang/Aset daerah	SKPD	CakupanTanah Pemda Yang bersertifikat	51%	826,525,000	APBD			51%	951,475,000	
			4.04.05.17.35	Peningktan dan Pemeliharaan SIMDA BMD	SKPD	Jumlah Simda yang terpelihara	2	43,900,000	APBD			2	56,950,000	
			4.04.05.17.36	Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD	SKPD	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD	44	55,425,000	APBD			44	48,750,000	
			4.04.05.17.37	Fasilitasi Majelis TP-TGR	SKPD	Cakupan BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan oleh SKPD	100%	107,950,000	APBD			100%	107,950,000	
			4.04.05.17.38.00	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas	SKPD	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	1 Buah	1,829,970,000	APBD			1 Buah	505,000,000	
			4.04.05.17.39.00	Pengelolaan Aset Kendararaan dinas/ Operasional	SKPD	Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Buah	16,800,000	APBD			2 Buah	23,200,000	
4.04.05.17.40	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	4 Buah	480,400,000	APBD			4 Buah	470,000,000				

Kandangan, Juni 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.A.P.
NIP. 19690919 198602 1 004

83.33

|